



Judul	: BPIH 2025 bakal lebih murah: Senayan wanti-wanti, layanan haji harus tetap maksimal
Tanggal	: Senin, 30 Desember 2024
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 8

BPIH 2025 Bakal Lebih Murah

Senayan Wanti-wanti, Layanan Haji Harus Tetap Maksimal

Senayan mendukung langkah Kementerian Agama (Kemenag) yang akan menurunkan biaya haji tahun 2025. Senayan berpesan, meski biayanya lebih murah, layanan untuk haji harus tetap maksimal.

ANGGOTA Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, rencana penurunan Biaya Penyelegaraan Ibadah Haji (BPIH) menjadi kabar gembira bagi para calon jemaah. Penurunan biaya akan meringankan beban calon jemaah. "Tapi, tetap jaga kualitas pelayanan haji dan sustainabilitas dari keuangan haji," kata dia, Minggu (29/12/2024).

Hidayat menuturkan, DPR setiap tahunnya telah berupaya menekan biaya haji menjadi lebih terjangkau. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan haji 3 tahun terakhir, dengan DPR mampu menurunkan biaya haji jauh lebih rendah daripada usulan Pemerintah.

Pada tahun 2022, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan Rp 45 juta per jemaah, namun ditolak oleh DPR dan disepakati di angka Rp 39,8 juta. Kemudian, di tahun 2023, biaya haji usulan Kemenag melonjak naik menjadi Rp 69 juta, dan lagi-lagi ditolak DPR dan disepakati menjadi Rp 49,8 juta. Begitu juga di 2024, usulan Kemenag mencapai Rp 73,5 juta, namun akhirnya disepakati menjadi Rp 56 juta.

"Setiap rapat di Komisi VIII dan Panja Haji, kami berupaya keras memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya calon jemaah haji. Hingga akhirnya biaya yang dibayar jemaah selaturun," sebutnya.

Karena itu, dia mengapresiasi langkah Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar agar haji tahun ini menjadi lebih murah dan terjangkau, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Penurunan biaya haji ini merupakan kesamaan persepsi antara Pemerintah dengan Komisi VIII DPR untuk menghasilkan biaya haji yang lebih terjangkau namun tetap berkualitas.

Wakil Ketua MPR ini lalu mengungkapkan penyebab biaya haji menjadi mahal. Salah satunya, komponen biaya penerbangan yang mencakup lebih dari sepertiga biaya haji, yang mestinya dikoreksi. Sistem carter penerbangan yang dialankan selama ini seharusnya bisa ditekan ke level wajar, tidak merugikan jemaah, tetapi menguntungkan maskapai penerbangan.

"Selain itu, ada biaya pemonitoran, biaya transportasi, biaya

katering, serta biaya masyair yang mestinya bisa diturunkan melalui penganggaran yang realistik maupun lobi-lobi dengan berbagai pihak di Arab Saudi," ujarnya.

Pihaknya juga mengusulkan agar durasi tinggal jemaah haji selama di Arab Saudi bisa dipangkas dari 40 hari menjadi 30 hari. Jika kebijakan itu ditempuh, akan signifikan mengurangi pembiayaan. Dia yakin, jika kebijakan tersebut benar ditempuh, bisa menekan biaya haji hingga 25 persen.

"Dengan keseluruhan biaya haji diusulkan sama seperti tahun lalu yakni sebesar Rp 93,4 juta, maka Biaya Penyelegaraan Ibadah Haji pasca-efisiensi bisa ditekan hingga di level Rp 70-an juta," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syaf'i menegaskan, biaya

ibadah haji 2025 akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan komitmen dari Pemerintah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo yang memberikan perhatian khusus terhadap penyelegaraan tahun ini.

"Skema usulan Biaya Penyelegaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Hasil revisi akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR untuk dibahas dalam Panitia Kerja," ungkap Romo Syaf'i.

Romo menjelaskan, Panja Haji rencana akan dibentuk pada 30 Desember 2024 pada Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR. Setelah itu, Pemerintah dan DPR akan memutuskan berapa besaran penurunan biaya haji tahun 2025. ■ KAL